

## **BAB V**

### **EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA YOGYAKARTA 2015-2016**

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi – preferensi politis dari actor yang terlibat dalam proses kebijakan , khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Kebijakan yang baik tentu saja haruslah didasari dari isi kebijakan tersebut. Isi kebijakan yang baik tentu saja akan menimbulkan dampak kepada masyarakat, diharapkan outputnya akan baik kepada masyarakat. Dan tentu saja akan ada timbal balik dari masyarakat nantinya. Dinas Sosial Kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang sangat konsern dalam hal penanggulangan kemiskinan kota yogyakarta.

Kebijakannya adalah menumbuh kembangkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat melalui peningkatan pelayanan , sarana prasarana dan bantuan pemerintah cukup memadai guna menciptakan menekan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Pendampingan dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan memberikan bantuan seperti RASKIN , KUR , BSM.

Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai “sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia,

termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi.

Penanggulangan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah baik pada ranah nasional maupun pada ranah pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten. Dalam hal ini penanggulangan angka kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta sudah cukup banyak dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam proses kerjanya Dinas Sosial Kota Yogyakarta mengacu pada peraturan keputusan walikota Yogyakarta nomor 77 tahun 2016 tentang alokasi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kota Yogyakarta tahun 2016, peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2011 tentang usaha mikro kecil, dan menengah, keputusan walikota Yogyakarta nomor 217 tahun 2016 tentang pemberian jaminan pendidikan kepada peserta didik pemegang kartu menuju sehat sejahtera, peserta didik yang putus sekolah, penghuni panti asuhan swasta, tunggakan biaya pendidikan, beasiswa prestasi dan mahasiswa pemegang kartu menuju sejahtera berprestasi di kota Yogyakarta tahun 2016.

Tugas dan fungsi dinas sosial akan berjalan dengan baik apabila ada kerja sama yang baik antara aparatur di dalam dinas sosial kota Yogyakarta sendiri. Kemudian kerjasama dengan pihak diluar dari dinas sosial yang nantinya akan melancarkan dan memudahkan tugas dan fungsi dari bidang dinas sosial kota Yogyakarta. Dalam tugas dan fungsinya sebelum dinas sosial menyusun suatu program. Pihak dinas sosial terlebih dahulu melakukan survey dan mengecek kondisi masyarakat miskin yang dilakukan oleh dinas sosial ini bertujuan untuk

melihat mana saja para warga miskin yang harus dan berhak menerima bantuan dari pemerintah yang nanti akan dilaksanakan pemberian bantuan.

Setelah proses survey yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada penanggulangan kemiskinan selesai. Nanti akan didapatkan data kondisi warga miskin. Di bawah ini penulis sajikan data program Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan.

Beberapa program yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2016 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, keempat meningkatkan akses masyarakat miskin pelayanan dasar, kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang dilaksanakan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:

- a) Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan utama selain beras. (program yang berkaitan dengan fokus ini seperti penyediaan cadangan beras pemerintah 1 ton, stabilisasi/kepastian harga komoditas primer. ( RASKIN )

b) Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat / keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain :

1. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional
2. Bimbingan teknis pendampingan dan pelatihan pengelola lembaga keuangan mikro / koperasi simpan pinjam
3. Pelatihan budaya , motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro
4. Pembinaan sentra – sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
5. Fasilitas sarana dan prasarana usaha mikro
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
7. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
8. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
9. Peningkatan pelaksanaan pendaftaran tanah
10. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin

c) Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin antara lain :

1. Program nasional pemberdayaan masyarakat ( PNPM) di daerah pedesaan dan perkotaan
2. Program pengembangan instruktur sosial ekonomi wilayah
3. Program pembangunan daerah tertinggal dan khusus
4. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat

d) Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan , kesehatan , dan prasarana dasar antara lain :

1. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI) dan sekolah menengah pertama (SMP)
2. Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi
3. Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara Cuma Cuma di kelas 3 rumah sakit

e) Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan untuk melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi , program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
2. Pemberdayaan sosial keluarga , fakir miskin , komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahtraan sosial lainnya
3. Bantuan sosial untuk mmasyarakat rentan , korban bencana alam , dan korban bencana sosial
4. Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin
5. yang mememnuhi persayaratan ( pemeriksaan kehamilan ibu , imunisasi , dan pemeriksaan rutin BALITA , menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Irianto Edi Purnomo selaku kepala dinas sosial , beliau mengatakan :

*“Pelaksanaan program kebijakan penanggulangan kemiskinannya berjalan dengan baik dengan adanya proram RASKIN, KUR, BSM*

*dapat meringankan sedikit beban hidup orang miskin , untuk RASKIN diberikan ke warga miskin dalam sebulan sekali 15 kg per bulan“*

Dari pernyataan beliau diatas , dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial berusaha secara maksimal untuk memberikan bantuan dari pemerintah lalu menyalurkan kepada warga warga miskinnya , guna untuk meringankan beban warga miskin dengan adanya program program pemerintah. Guna menekan angka kemiskinan di yogyakarta

Namun terlepas dari banyaknya program dan kegiatan tersebut peneliti kemudian akan mengkaji beberapa hal terkait dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut:

#### **5.1. EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Membahasa efektivitas artinya penulis menjelaskan apakah suatu upaya mampu mencapai harapan yang diinginkan. Yogi dalam Jurnal JAKPP (*Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*) **Volume 2 Nomor 1 Juni 2016**, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2 per hari. Dengan definisi ini maka diperkirakan pada tahun 2001 terdapat 1,1 miliar orang di dunia yang pendapatannya kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang di dunia yang pendapatannya kurang dari \$2/hari (*The World Bank, 2007, Understanding Poverty*).

Hasil penelitian Yogi dalam *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*) **Volume 2 Nomor 1 Juni 2016**, menjelaskan upaya

penanggulangan kemiskinan kegagalan penanggulangan kemiskinan di kota Bandung terjadi karena beberapa alasan: (

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan lampiran II peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 129/HUK/2008 tentang teknis standar pelayanan minimal bidang sosial dan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per 15/MEN/X/2010 tentang SPM bidang ketenaga kerjaan yang harus diseleenggarakan oleh pemerintah Kabupaten.kota adalah:

- (1) Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala kabupaten/kota dengan indikator: (a) persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. (b) prosentase pencapaian adalah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial. (c) batas waktu pencapaian untuk tahun 2010 adalah sebesar 50 %
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembedayaan masyarakat sosial skala kabupaten/kota dengan indikator: (a) presentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau kelompok sosial ekonomi dan sejenisnya. (b) prosentase pencapaian adalah jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya bagi jumlah PMKS dalam satu tahu yang

seharusnya menjadi program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya skala kabupaten/kota. (c) batas pencapaian SPM untuk tahun 2012 adalah sebesar 37%

(3) Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala kabupaten/kota dengan indikator: (a) persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana/prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. (b) persentase pencapaian adalah jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos dibagi jumlah panti sosial dalam waktu 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos kabupaten kota. (c) batas waktu pencapaian SPM untuk tahun 2012 adalah sebesar 100%.

(4) Penyediaan sarana dan prasaran pelayanan luar panti skala kabupaten kota dengan indikator: (a) persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. (b) persentase pencapaian adalah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota. (c) batas waktu pencapaian SPM untuk tahun 2012 adalah sebesar 50%

- (5) Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota dengan indikator: (a) persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. (b) prosentase pencapaian adalah jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama 1 tahun dibagi jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten/kota dalam 1 tahun. (c) batas pencapaian SPM untuk tahun 2015 adalah 80%.
- (6) Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten kota dengan indikator: (a) persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. (b) persentase pencapaian adalah jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak berpotensi yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten/kota dalam satu tahun. (c) batas waktu pencapaian SPM untuk tahun 2015 adalah sebesar 80%.

Berdasarkan Rencana Strategis kota Yogyakarta tahun 2012-2016, pemerintah kota memiliki 6 (enam) indikator kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat. Hingga tahun 2016 capaian indikator tersebut sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Masing-Masing Indikator Kinerja Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Populasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat capaian</b>
1	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya	650	520	650	125%
2	Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan prasarana sarana pelayanan sosial	13	13	13	100%
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4.411	3.529	3.558	101%
4	Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	1.642	1.642	1.642	100%
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, sera lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	3.650	1.460	2.585	177%
6	Persentase jumlah penduduk miskin	11,22%	8,4%	8,6%	102%
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	22	14	14	100%

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dinas sosial kota yogyakarta pada tahun 2016 diatas angka 100%. Hal ini menunjukkan besarnya usaha dan kiat pemerintah kota Yogyakarta untuk penanggulangan kemiskinan kota. Tingginya capaian masing-masing indikator tentu tidak terlepas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas sosial pada tahun 2016. Adapaun kegiatan pada setiap indikator tersebut sebagai berikut:

(1) Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya dengan target indikator 520 populasi yang menerima KUBE, realisasi untuk indikator ini tercapai 650 populasi pada tahun 2016. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irianto Edi Purnomo kepala Dinas Sosial beliau menyampaikan :

*“Salah satu upaya yang kami lakukan untuk mengurangi angka kemiskinan kota adalah pemberdayaan PMKS. Pada tahun 2016 kami bisa mencapai target yang sudah kami tetapkan bahkan lebih dari apa yang kami targetkan sesuai dengan ada di dokumen. Yang kami sasarkan pada indikator ini terutama masyarakat fakir dan miskin yang notabena tidak punya sumber mata pencaharian atau yang punya mata pencaharian namun tidak memenuhi kebutuhan dasar”*

Dari penjelasan wawancara diatas, upaya penanggulangan kemiskinan pada indikator ini sangat tepat sehingga mampu menekan drastis angka kemiskinan kota yogyakarta.

(2) Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan prasarana sarana pelayanan sosial pada tahun 2016 terealisasi dengan jumlah 13 panti dari target yang ditetapkan 13 panti, dari hasil realisasi tersebut maka capaian kinerjanya adalah 100%. Berhasilnya indikator tersebut tidak terlepas dari besarnya anggaran yang di anggarkan oleh pemerintah kota yogyakarta. Namun capaian tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Irianto Edi Purnomo kepala Dinas Sosial:

*“Jika melihat target dan realisasi , alhamdulillah kita sudah mencapai 100%. Namun jika dibanding dengan capaian tahun sebelumnya, capain ini masih lebih kecil. Lebih kecil karena ada beberapa panti yang berpindah lokasi ke wilayah kabupaten.”*

Dari wawancara diatas menjelaskan, meskipun capaian kinerja mencapai 100% namun ini masih di anggap kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya capaian indikator bukan dikarenakan ketidak mampuan dinas sosial melainkan karena panti berpindah wilayah ke kabupaten. Keberhasilan pencapaian indikator ini juga karena didukung kegiatan yang berbasis peningkatan kesejahteraan sosial dalam panti sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Irianto Edi Purnomo kepala Dinas Sosial menyampaikan:

*“selain jumlah anggaran yang memadai dan SDM yang sesuai dengan kapasitas, keberhasilan juga didukung dengan kegiatan yang berbasis peningkatan kesejahteraan sosial seperti : (a) seleksi calon penghuni panti, (b) forum kreativitas anak panti asuhan se Kota Yogyakarta, (c) monitoring panti, (d) Forum KIE panti sosial dan (e) layanan rekreasi lansia dalam panti se-kota yogyakarta.”*

(3) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dari target 3.529 orang PMKS penerima bantuan sosial, dapat terealisasi sebanyak 3.558 orang PMKS. Melihat perbandingan target dan realisasi maka capaian kinerja indikator pada tahun 2016 adalah 101%. Tingginya capaian indikator ini tidak terlepas dari beberapa kegiatan antara lain : Rehabilitasi PMKS, pelayanan PMKS, pelayanan anak terlantar di panti anak wiloso projo, pelayanan gelandangan dan pengemis di panti karya dan pelayanan jompo terlantar di panti wredha budhi dharma.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Irianto Edi Purnomo kepala Dinas Sosial menjelaskan :

*“Memang hampir rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun ini mencapai target. Namun di balik itu kami anggap sebagiannya masih rendah di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan selain itu , kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan ini semuanya mampu mendukung tercapainya target indikator. Seperti indikator ini di dukung oleh kegiatan pelayanan kepada jompo, gelandangan, pengemis , anak terlantar dan penyandang masalah kesejehtraan sosial lainnya”.*

(4) Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Pada tahun 2016 indikator ini di tetapkan target sebesar 1.642 KK. Pada akhir 2016 indikator ini mampu terealisasi sepenuhnya dengan capaian kinerja indikator sebesar 100 persen. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Irianto Edi Purnomo kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi menyampaikan:

*“indikator berikutnya adalah pemberian bantuan sosial pada masa tanngap darurat. Tingginya angka korban bencana juga berdampak kepada tingginya angka kemiskinan. Sehingga kami dari dinas sosial membuat indikator ini dengan harapan dapat menekan angka kemiskinan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator ini seperti : penyaluran bansos (kan saat ini banyak bantuan sosial yang di kucurkan oleh kementrian sosial, baik bantuan tunai maupun non tunai), pemberian bantuan pada korban bencana saat terjadi bencana. Kalo untuk korban bencana kami memberikan bantuan berupa sembako, sandang, dan bantuan lainnya. Namun bantuan itu biasanya tidak hanya datang dari kami, tapi juga bantuan dari para relawan baik dari kota yogyakarta sendiri maupun relawan dari luar kota. Dan kami merasa sangat terbantu.”*

Dari wawancara diatas menjelaskan tinggi dan tercapainya keberhasilan indikator ini tidak lepas dari banyaknya bantuan sosial dari pusat (kementrian sosial) dan juga bantuan para relawan pada saat terjadi bencana kota.

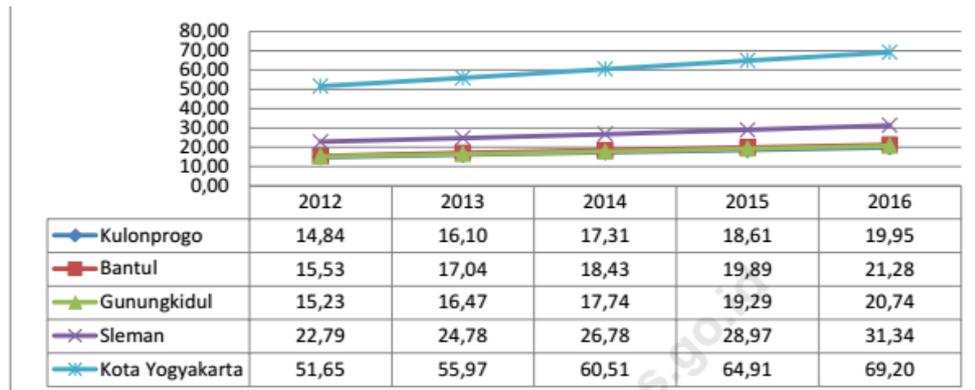
- (5) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, sera lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Pada tahun 2016 indikator ini di tetapkan target sebesar 1.460 orang. Pada akhir 2016 indikator ini mampu terealisasi 2.585 dengan capaian kinerja indikator sebesar 177 persen.
- (6) Presentase jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2016 indikator ini di tetapkan target sebesar 18,4%. Pada akhir 2016 indikator ini mampu terealisasi 8,6% dengan capaian kinerja indikator sebesar 102 persen. Melihat tingginya capaian kinerja indikator ini tentu tidak terlepas dari beberapa program pemerintah pusat yang digulirkan melalui pemerintah kota yogyakarta, sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Irianto Edi Purnomo kepala Dinas Sosial:

*“Selain dari program yang memang dari rencana strategis kita, kita merasa sangat terbantu dengan adanya beberapa program pemerintah pusat dari kementerian sosial seperti pendampingan keluarga harapan , dan program lainnya yang sudah berjalan sejak tahun 2010 seperti BLT (bantuan langsung tunai) dan lainnya, dan masih banyak lagi program pengentasa kemiskinan dari pusat dari kementerian lainnya. Artinya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat memang menjadi perhatian besar dan PR bersama. Selain itu hingga tahun 2018 kami masih harus berjuang keras untuk mengentas kemiskinan kota. Salah satu upaya kami di awal tahun ini memberikan pelatihan melalui dinas koperasi yang kemarin di relase melalui situs resmi jogjakota.go.id ”.*

Dari wawancara diatas tinggi dan banyaknya program pengentasa kemiskinan kemudian menjadi alasan tingginya capaian indikator kinerja ini.

- (7) Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen LAKIP Dinas Sosial tahun 2016 capaian kinerja indikator ini sebesar 100 persen. Dari 14 buah WKSBM target yang ditetapkan mampu teralisasi sebanannya 14 buah. Capain ini sama jika dibandingkan dengan standar nasional atau SPM. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, prosentase capaian kinerja tahun 2016 sedikit menurun. Capaian indikaotor ini pada tahun 2015 mencapai 108 persen dari 13 buah WKSBM dapat tersedia 14 buah WKSBM.

Selain itu efektif atau tidaknya program juga peneliti ukur dengan tingginya angka PDRB per kapita kota yogyakarta dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di DIY sebagaimana yang tertuang pada gambar dibawah ini :



Sumber : BPS Bantul, 2017

Dilihat dari gambar diatas, kota yogyakarta lebih unggul dibandingkan kabupaten lainnya. Hingga pada tahun 2016 jumlah PDRB per kapita kota yogyakarta naik hingga 6 percent dari tahun sebelumnya. Selain itu upaya penanggulangan.

## 5.2. EFISIENSI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Efisiensi artinya penulis berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki. Evaluasi kebijakan pengentasan kemsikinan dengan sub fokus efisiensi dalam pelaksanaan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut efisien dalam waktu, efisien dalam hal tenaga, dan efisien dalam hal pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian dalam efisiensi waktu dapat dipaparkan

bahwa program pengentasan kemiskinan memerlukan waktu yang cukup lama terutama dalam identifikasi masalah kemiskinan, jenis kemiskinan yang ada, pola penanganan yang akan dilaksanakan, tahapan dalam penanganan dan lain sebagainya.

*Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume VII, Nomor 02, September 2015* yang ditulis oleh Juli Panglima Saragih upaya pengentasan kemiskinan juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DIY melalui dua kebijakan yaitu kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung. Kebijakan tidak langsung yang dilakukan Pemerintah DIY meliputi (1) upaya menciptakan ketenteraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik, (2) mengendalikan jumlah penduduk, dan (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Kebijakan tidak langsung juga dapat mendukung dan bersinergi dengan kebijakan langsung.

Kebijakan langsung mencakup (1) pengembangan data dasar (base data) penduduk miskin dalam penentuan kelompok sasaran (targeting), (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan), (3) penciptaan kesempatan kerja, (4) program pembangunan wilayah (PPW), (5) pengalokasian anggaran penanggulangan kemiskinan dalam APBD, dan (6) pelayanan perkreditan seperti KUR.

Selain itu penanggulangan yang dilakukan pemerintah provinsi DIY dibagi kepada 3 kelompok program sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Keterangan	Program	Sasaran
Kelompok Program I	Program keluarga harapan	Rumah tangga miskin dan sangat miskin
	Program jamkesmas	Rumah tangga hampir miskin
	Program Raskin	Rumah tangga miskin dan sangat miskin
	Program beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin	Siswa dari Rumah tangga miskin dan sangat miskin
	Sekolah Dasar (SD/MI)	Siswa SD dari Rumah tangga miskin dan sangat miskin
	Sekolah menengah pertama	Siswa SMP dari Rumah tangga miskin dan sangat miskin
	Sekolah menengah atas	Siswa SMA dari Rumah tangga miskin dan sangat miskin
	Pendidikan tinggi	Mahasiswa dari Rumah tangga miskin dan sangat miskin
Kelompok Program II	Perogram pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Kelompok Masyarakat Umum
	1. PNPM Mandiri Perdesaan	Masyarakat perdesaan
	2. PNPM Mandiri Perkotaan	Masyarakat perkotaan
	3. PNPM Daerah tertinggal	Masyarakat pedalaman
	4. PNPM peningkatan pengembangan infrastruktur perdesaan (PIIP)	Masyarakat perdesaan
	5. PNPM Pembangunan ekonomi wilayah (PISEW)	Masyarakat perdesaan
	6. PNPM Usaha agrobisnis pertanian	Masyarakat pertanian perdesaan
	7. PNPM Kelautan dan Perikanan	Masyarakat pesisir dan pelaut
	8. PNPM Generasi	Masyarakat perdesaan
	9. PNPM Pariwisata	Masyarakat pedesaan potensial
10. PNPM green kecamatan development program	Masyarakat perdesaan	

	11. PNPB Neighbourhood development	Masyarakat pedesaan
Kelompok program III	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Usaha mikro, kecil dan menengah
	Program KUBE dan EUP	Kelompok usaha bersama dan usaha ekonomi produktif

Sebagaimana tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja dan rencana strategis Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Pemerintah kota memiliki 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Sebagaimana yang tertuang pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.2**  
**Rincian anggaran dan realisasi kegiatan per indikator kinerja tahun 2016**

Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Kategorisasi efisien
Meningkatnya penanganan masalah sosial dan terwujudnya kemandirian masyarakat di bidang sosial	Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya	125%	Sangat Efisien
	Peningkatan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial dalam panti	Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan prasarana sarana pelayanan sosial	100%	Sangat Efisien
	Pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	101%	Sangat Efisien
	Koordinasi pelayanan bantuan sosial	Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa	100%	Sangat Efisien

		tanggap darurat		
	Pendataan PMKS dan PSKS	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, sera lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	177%	Sangat Efisien
	Pemberdayaan fakir miskin	Presentase jumlah penduduk miskin	102%	Sangat Efisien
	Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan	100%	Sangat Efisien

Dari tabel diatas peneliti akan menjelaskan sejauhmana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh dinas sosial kota yogyakarta dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan kota yogyakarta. Adapun efisiensi tersebut dapat dilihat dari penggunaan anggaran dan capaian keberhasilan indikator kinerja yang sebagai berikut:

- (1) Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 389.435.965 dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar 413.869.300 dengan persentase serapan anggaran 94 %. Dari realisasi anggaran tersebut capaian indikator ini mampu melebihi target capaian 25 persen dari target yang di tetapkan.

- (2) Peningkatan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial dalam panti. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 99.485.000 dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar 101.885.000 dengan persentase serapan anggaran 97,64%. Melihat realisasi anggaran pada kegiatan ini sangat efisien bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang memenuhi target 100 persen.
- (3) Pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Peningkatan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial dalam panti. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 502.429.922,36 dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar 508.716.100 dengan persentase serapan anggaran 101%. Melihat realisasi anggaran pada kegiatan ini sangat efisien bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mampu melampaui target sebesar 1 persen dari target yang ditetapkan.
- (4) Koordinasi pelayanan bantuan sosial. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 602.565.303,68 dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 709.311.126 dengan persentase serapan anggaran 84,90%. Melihat realisasi anggaran pada kegiatan ini sangat efektif bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mampu mencapai target sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan.
- (5) Pendataan PMKS dan PSKS. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 938.573.299,20 dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 953.685.084 dengan persentase serapan anggaran 92,92%. Melihat realisasi anggaran pada kegiatan ini sangat efisien bila

dibandingkan dengan capaian kinerja yang mampu melebihi target sebesar 77 persen dari target yang di tetapkan.

(6) Pemberdayaan fakir miskin. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 267.043.950 dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 271.329.000 dengan persentase serapan anggaran 98,40%. Melihat realisasi anggaran pada kegiatan ini sangat efisien bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mampu melebihi target sebesar 2 persen dari target yang di tetapkan.

(7) Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial. Realisasi penggunaan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 757.202.595 dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 768.205.850 dengan persentase serapan anggaran 98,56%. Melihat realisasi anggaran pada kegiatan ini sangat efisien bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mampu mencapai target sebesar 100 persen dari target yang di tetapkan.

### **5.3. KECUKUPAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi **Volume VII, Nomor 02, September 2015** Juli Panglima Saragih menjelaskan Sejak tahun anggaran 1999, pemerintah DIY telah membuat Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPKP) di DIY melalui Program P2KP peduli yang diwujudkan ke dalam tiga bentuk yaitu pertama, Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL); kedua, Unit Pengelolaan Keuangan (UPK); dan

ketiga, Unit Pengelolaan Sosial (UPS). Salah satu keunggulan PPKP adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai agen utama (community based program). Dalam program P2KP, peran birokrasi dan fasilitator perlu diminimalisir. Sebaliknya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) DIY yang merupakan representasi dari kelembagaan masyarakat di tingkat lokal justru diberdayakan sebaik mungkin. Program PPKP yang paling menonjol adalah dana bergulir bagi kelompok usaha miskin atau kelompok usaha bersama (KUBE). Sistem yang dibangun dalam dana bergulir (revolving fund) ini adalah tanggung-renteng. Dengan demikian setiap individu dalam kelompok punya tanggung jawab mengembalikan dana pinjaman itu yang selanjutnya akan digulirkan untuk kelompok usaha miskin lainnya. Modal awal dana bergulir ini dianggarkan Pemerintah DIY dalam APBD.

Sejauh ini melihat capaian kinerja indikator penanggulangan kemiskinan semua indikator mampu tercapai sepenuhnya 100 persen bahkan lebih dari target. Hal tersebut menunjukkan tingkat kecukupan komponen kegiatan-kegiatan merupakan salah satu penunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan. Hal serupa juga disampaikan oleh kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada wawancara langsung kepada Bapak Irianto Edi Purnomo beliau menyampaikan:

*“Sebagaimana yang kami tuangkan dalam laporan tahunan kami, tahun ini semua indikator kinerja kegiatan mampu tercapai sepenuhnya 100 persen khususnya sasaran pertama “peningkatan penanganan masalah sosial”. Namun terlepas dari besarnya dukungan pemerintah dalam hal dana, keberhasilan ini*

*tidak terlepas dari komponen kegiatan – kegiatan yang kami laksanakan untuk mencapai target indikator tadi.”.*

Dari wawancara diatas kepala Dinas menyampaikan bahwa tingkat efektifitas indikator kinerja tersebut sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.3 Komponen-Komponen Kegiatan Berdasarkan Kegiatan Dan Indikator Kinerja**

<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Komponen-Komponen Kegiatan</b>
Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenis lainnya	- Pemberdayaan masyarakat fakir miskin
Peningkatan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial dalam panti	Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan prasarana sarana pelayanan sosial	- Seleksi calon penghuni panti - Forum kreativitas anak panti asuhan se kota yogyakarta - Monitoring panti - Forum KIE panti sosial - Layanan rekreasi lansia dalam panti se kota yogyakarta
Pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	- Rehabilitasi PMKS - Pelayanan PMKS - Pelayanan anak terlantar di panti anak wiloso prjo - Pelayanan gelandangan dan pengemis di panti karya dan - Pelayanan jompo terlantar di panti wredha budhi dharma
Koordinas pelayanan bantuan sosial	Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	- Penyaluran bantuan sosial
Pendataan PMKS dan PSKS	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, sera lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	- Pelayanan dan perlindungan dan rehabilitasi sosial - Pendampingan sosial
Pemberdayaan fakir miskin	Presentase jumlah penduduk miskin	- Pengembangan usaha ekonomi kreatif melaluikelompok usaha bersama (KUBE)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Komponen-Komponen Kegiatan
		- Pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) – KUBE
Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	- Bimbingan dan peningkatan kapasitas WKSBM dengan komponen pembinaan WKSBM.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa masing-masing kegiatan punya minimal 1 (satu) kegiatan yang laksanakan untuk mendorong keberhasilan indikator kinerja. Sehingga pada tahun 2016 angkat pendapatan perkapita setiap bulan mencapai Rp 401.193,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang tertuang pada tabel 5.4 dibawah ini:

**Tabel 5.4 Angka variabel kemiskinan tahu 2012-2016 Kota Yogyakarta**

Variabel Kemiskinan	Kemiskinan Kota Yogyakarta							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	265.168	290.286	314.311	333.232	353.602	366.520	383.966	401.193
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	45.30	37.80	37.70	37.40	35.60	35.60	36	32.06
Persentase Penduduk Miskin	10.05	9.75	9.62	9.38	8.82	8.67	8.75	7.70

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin pada tahu 2016 sebesar 7,70 persen juga pertanda adanya penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 dan tahun tahun sebelumnya.

#### **5.4. PERATAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Pemerataan dalam implementasi program pengentasan kemiskinan menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah harus memiliki data yang akurat yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan. Ada dilema yang terjadi dilapangan, yaitu terkait penentuan jumlah warga miskin disetiap daerah. Dalam proses identifikasi warga miskin yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, selalu menimbulkan konflik internal dalam masyarakat. Data yang dilahirkan BPS (Badan Pusat Statistik) tidak bisa dijadikan acuan bagi dalam program penanggulangan kemiskinan dikarenakan keakuratan data sangat diragukan. Banyak faktor yang menyebabkan data BPS tidak dapat dipakai, diantaranya adalah proses pendataan yang tidak maksimal, tidak adanya koordinasi dengan pihak kelurahan.

Dengan kondisi itu maka pemerintah kota (Dinas Sosial) mengambil langkah yang sangat kreatif, yaitu mencoba idntifikasi ulang masyarakat miskin yang ada di wilayah kota yogyakarta. Dari langkah ini pemerintah kota mendapatkan data yang lebih akurat dibandingkan data BPS. Dalam proses pendataan, dinas sosial melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga memiliki tingkat kontrol yang tinggi dalam implementasi program nantinya

Berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan. Berdasarkan dari wawancara bersama kepada Bapak Irianto Edi Purnomo pada pembahasan sebelumnya. Penulis menyimpulkan bahwa distribusi kegiatan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya di sasarkan kepada

masyarakat fakir dan miskin. Namun juga kalangan masyarakat lainnya yang memiliki atau penyandang masalah sosial kesejahteraan. Dapat kita lihat dari 7 (tujuh) kegiatan, sebagai berikut lapisan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatannya pada tahun 2016:

- (1) Panti asuhan
- (2) Fakir Miskin
- (3) Penyandang Cacat
- (4) Panti jompo
- (5) Anak terlantar
- (6) Dan PMKS lainnya.

Untuk menekan angka kemiskinan pemerintah kota tidak saja fokus kepada kemiskinan, namun kategori lainnya yang merupakan komponen penyusunan angka kemiskinan juga ikut menjadi fokus perhatian serentak. Selain itu meratanya pelaksanaan program pada kebijakan penanggulangan kemiskinan kota yogyakarta ini juga dapat dibuktikan dengan turunnya angka jumlah penduduk miskin seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.5 Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta tahun 2009-2016**

Kemiskinan	Kemiskinan Kota Yogyakarta							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	45,30	37,80	37,70	37,40	35,60	35,60	36	32,06

*Sumber :diolah dari data bps*

Dari tabel diatas dapat peneliti jelaskan penurunan angka persentase penduduk miskin tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan sekitar 3,

94 dari tahun 2015. Penurunan tersebut merupakan bukti bahawa program penanggulangan kemiskinan sudah terlaksana sesuai dengan sasaran program. Namun disisi lain pengalokasian anggaran kemiskinan baik yang terutama bersumber dari APBN dirasa maasih belum merata dari segi pemerataannya. Hal ini disebabkan karena data jumlah dan sebaran penduduk miskin masih ada yang belum tersentuh oleh kebijakan program nasional secara maksimal.

#### **5.5. RESPONSIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINA**

Responsivitas pada konsep evaluasi kebijakan yaitu menjawab apakah hasil kebijakan apakah memuaskan kebutuhan obyek dari program, apakah mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mampu meningkatkan aset dan akses masyarakat miskin, mampu meningkatkan daya kemandirian masyarakat dan lain-lain. Pada tahap evaluasi ini maka unsur yang paling penting adalah feedback dari penerima program. Pernyataan, sikap dan perikaku penerima program merupakan cerminan dari responsivitas. Kasus serupa yang di teliti oleh Asna Aneta dalam *Jurnal Administrasi Publik Volume 1 tahun 2010* yang dilakukan oleh pemerintah makassar dalam program penanggulangan kemiskinan. Namun program yang gulirkan adalah program pusat yaitu P2KP. Dalam jurnal tersebut di jelaskan kat responsivitas pemerintah dapat dilihat dari daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat,

kemampuan aparatur pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan seluruh tahapan P2KP. Berikut ini ditunjukkan konsistensi pemerintah Kota Gorontalo dalam mendukung pelaksanaan P2KP khususnya dalam pengalokasian anggaran pada APBD sebagai dana sharing ataupun dana pendamping pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan P2KP di kota Gorontalo.

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara yang didukung oleh data dan dokumen yang relevan dapat ditegaskan bahwa responsivitas atau daya tanggap pemerintah Kota Gorontalo terhadap implementasi kebijakan P2KP, terlihat pada kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat khususnya komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana sharing melalui APBD Kota Gorontalo setiap tahunnya, sebesar 50 persen dari total anggaran P2KP dari pemerintah pusat.

Hal tersebut berbeda dengan yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah sebuah gagasan yang diciptkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Bermula dari pembenahan lingkungan fisik, pemberdayaan dan penggalian potensi masyarakat sampai kepada penanganan masalah sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Berkenaan dengan responsivitas, dalam hal ini peneliti menerangkan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

Selain itu masih ada upaya lain selain menjalankan program pusat. Sebagaimana yang di paparkan pada indikator sebelumnya pemerintah sangat reseponsive dalam menekan angka kemiskinan kota dengan berbagai cara diantaranya pemberian pelatihan kepada kelompok usaha bersama yang mereka alokasikan dari dana APBD Koa.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan dari kelompok usaha bersama (KUBE) dengan narasumber Ibu Maryati pada jum'at 24 November 2017 di kediamannya di Cokrodirjan. Beliau merupakan salah satu anggota KUBE binaan dinas sosial kota Yogyakarta menjelaskan dalam wawancara langsung :

*“sejauh ini kami sangat merasakan upaya keras pemerintah kota dalam menekan angka kemiskinan tidak hanya melihat atau terfokus pada satu kelompok saja. Namun sejauh kami yang tergabung dalam KUBE wilayah Cokrodirjan ini sering kali di berikan pendampingan serta pelatihan untuk menunjang usaha kelompok kami. Selain itu, beberapa kali kami diberikan anggaran untuk pengembangan produk dan kapasitas SDM kami”.*

Dari wawancara diatas peneliti menerangkan bahwa salah satu penerima manfaat merasakan dampak dari adanya berbagai kegiatan dari program penanggulangan kemiskinan ini. Tidak hanya itu peneliti juga mewawancarai objek yang menjadi sasaran dari program penanggulangan kemiskinan ini yaitu para pengurus Panti Wredha Budhi Dharma sebagai salah

satu UPT panti jompo yang beralamatkan di Giwangan umbulharjo itu bapak

Rusdi menjelaskan :

*“Kami selaku pengelola merasakan adanya campur tangan baik pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial salah satunya kami sebagai pengelola para lansia di panti wredha budhi dharma beberapa kali para fasilitator (pekerja sosial) kami diberikan pelatihan dalam menangani dan melayani lansia dan bisa berinteraksi dengan baik kepada para lansia ini. Selain itu juga kami juga di berikan beberapa kali bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan para lansia ini”.*

Dari wawancara ini sisi lain dari para penerima dampak atau objek sasaran program penanggulangan kemiskinan merasa puas dengan setiap pembinaan dan bantuan kegiatan yang lakukan oleh dinas sosial kota yogyakarta.

#### **5.6. KETEPATAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Dalam Jurnal Urban Poverty **FENOMENA KEMISKINAN PERKOTAAN DI YOGYAKARTA : SUATU KAJIAN STRUKTUR DAN RESPONS KEBIJAKAN** Aula Ahmad Hafidh dkk menjabarkan Secara umum masyarakat miskin tidak hanya ditandai dengan lemahnya faktor ekonomi akan tetapi merupakan suatu ketidakberdayaan masyarakat dalam berbagai hal, yaitu: Masyarakat miskin ditandai oleh ketidakberdayaan/ketidakkampuan dalam hal: (1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar; (2) melakukan kegiatan usaha produktif; (3) menjangkau akses sumberdaya sosial dan ekonomi; (4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik; dan (5) membebaskan diri

dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. Ketidakberdayaan/ketidakmampuan ini menumbuhkan perilaku miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan untuk berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025. Visi pembangunan kota yogyakarta tahun 2012-2016 adalah *“terwujudnya kota yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan:.* Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kemudian menuangkannya dalam misi ke tiga dan keempat yaitu : ***“mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan *segoro amarto*, dan mewujudkan daya saing yang kuat.”*** Untuk dapat melaksanakan daya saing yang kuat kemudian memerlukan masyarakat yang mandiri. Kemandirian ini kemudian akan terlahirkan dari proses peningkatan kesejahteraan masyarakat kota yogyakarta.

Tingginya angka kesejahteraan kota yogyakarta ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita manusia pertahun dan kecilnya angka kemiskinan yang ada di kota yogyakarta. Sebagaimana dijelaskana pada indikator sebelumnya, bahwa persentase angka kemiskinan kota yogyakarta pada tahun 2016 tinggal 7,70 persen dari tahun sebelumnya 8,57 persen. Hal ini kemudian menunjukkan garis sasaran stragis yang ditetapkan sejalan dengan apa yang ingin dicapai pada tahun 2016.

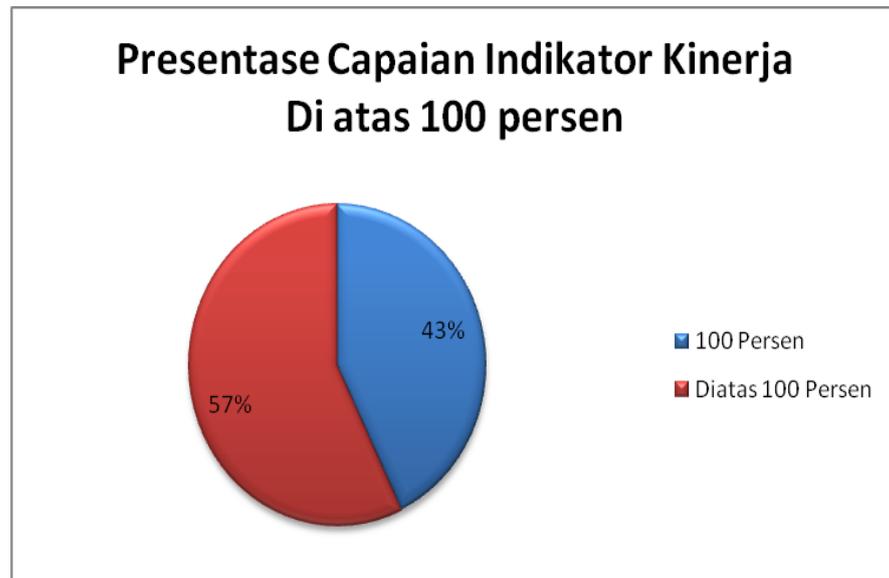
Pada tahun 2016 Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

- (a) Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial
- (b) Meningkatkan rehabilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- (c) Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus memberikan perlindungan ketenagakerjaan.

dari ketiga sasaran strategis diatas kemudian muncul kegiatan-kegiatan dari program rehabilitasi sosial antara lain :

- (1) Kegiatan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- (2) Kegiatan peningkatan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial dalam panti sosial.
- (3) Kegiatan pelayanan PMKS
- (4) Kegiatan pelayanan anak terlantar di panti anak wiloso prohjo
- (5) Kegiatan pelayanan jompo terlantar di panti wredha budhi dharma
- (6) Kegiatan pelayanan gelandangan
- (7) Kegiatan pendataan PMKS dan PSKS
- (8) Kegiatan penyaluran bantuan sosial
- (9) Kegiatan pemberdayaan fakir miskin

Dari sembilan kegiatan diatas kemudian peneliti menilai sangat tepat dengan capaian rata-rata indikator kinerja tercapai 100 persen. Sebagaimana yang tergambar pada grafik dibawah ini:



Dari gambar grafik diatas, peneliti menjelaskan bahwa persentase capaian indikator kinerja yang mencapai diatas 100 persen lebih tinggi sebesar 57 persen. Hal ini artinya ketepatan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan harapan yang diinginkan sudah tersinkronisasi dengan baik.